

Aktualisasi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Menanggulangi Fenomena Hate Speech di Media Sosial: Studi Kasus pada Komunitas Digital Kota Medan

Daniel Vidiarga Manik¹, Kaila Damara Carissa², Fadhil Satria Zebua³, Sulis Nuralia Lase⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: danielvmanik.5253151015@mhs.unimed.ac.id

Abstract

The development of social media has created a digital public sphere that enables people to interact and express their opinions openly. However, this openness also creates challenges through the increasing phenomenon of hate speech, which may disrupt social relations, strengthen group prejudice, and threaten diversity values within society. This study aims to analyze the actualization of Pancasila as an ethical system in addressing hate speech among digital communities in Medan City. This research employed a qualitative approach with a case study design using digital content analysis. Data were collected through digital observation and documentation of user interactions in the comment sections of Instagram accounts @medantalk and @medanviraltalk, selected due to their role as local digital public spaces. Data analysis was conducted through categorizing forms of hate speech and interpreting them based on Pancasila ethical values. The findings reveal that the identified forms of hate speech include insult, defamation, and provocation. The emergence of hateful expressions is influenced by the characteristics of discussed issues, user interaction dynamics, and social media algorithms that may amplify conflict-oriented content. The study demonstrates that Pancasila remains relevant as an ethical framework for digital communication through the values of humanity, unity, deliberation, and social justice. Addressing hate speech requires more than legal and technological approaches; it also requires strengthening ethical awareness among digital citizens. The actualization of Pancasila values can serve as a preventive approach to developing an inclusive, civilized, and diversity-oriented digital communication environment.

Keywords: Pancasila; ethical system; hate speech; social media; digital community; Medan City

Abstrak

Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat secara terbuka. Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya fenomena hate speech yang berpotensi mengganggu hubungan sosial, memperkuat prasangka kelompok, serta mengancam nilai keberagaman dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi Pancasila sebagai sistem etika dalam menanggulangi fenomena hate speech pada komunitas digital Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui metode analisis isi digital (digital content

analysis). Data penelitian diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap interaksi pengguna pada kolom komentar akun Instagram @medantalk dan @medanviraltalk yang dipilih berdasarkan karakteristiknya sebagai ruang komunikasi publik masyarakat lokal. Analisis data dilakukan melalui proses kategorisasi bentuk hate speech dan interpretasi berdasarkan nilai-nilai etika Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hate speech yang ditemukan meliputi penghinaan (insult), pencemaran nama baik (defamation), dan provokasi (provocation). Kemunculan ujaran kebencian dipengaruhi oleh karakteristik isu yang dibahas, dinamika interaksi pengguna, serta mekanisme algoritma media sosial yang dapat memperkuat visibilitas komentar bermuatan konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki relevansi sebagai kerangka etika digital melalui nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam membangun perilaku komunikasi yang bertanggung jawab. Penanggulangan hate speech tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan kesadaran etis masyarakat digital. Aktualisasi nilai Pancasila dapat menjadi pendekatan preventif dalam membangun ruang komunikasi digital yang inklusif, beradab, dan menghargai keberagaman.

Kata kunci: Pancasila; sistem etika; hate speech; media sosial; komunitas digital; Kota Medan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola hubungan sosial masyarakat modern. Media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal kini berkembang menjadi ruang publik digital (digital public sphere) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan gagasan, membangun identitas sosial, serta berpartisipasi dalam berbagai diskursus publik. Transformasi tersebut memberikan peluang bagi meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pertukaran informasi dan ekspresi demokratis. Namun, keterbukaan ruang digital juga menghadirkan persoalan baru berupa munculnya berbagai bentuk komunikasi yang berpotensi merusak hubungan sosial, salah satunya adalah fenomena hate speech atau ujaran kebencian.

Hate speech dalam ruang digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan kata-kata yang bersifat kasar atau menyerang individu tertentu, tetapi juga mencakup ekspresi yang mendorong diskriminasi, permusuhan, serta delegitimasi terhadap kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, etnis, ras, gender, maupun afiliasi sosial-politik. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, anonimitas pengguna, serta terbentuknya kelompok berbasis kesamaan pandangan (echo chamber) menyebabkan ujaran kebencian dapat berkembang secara luas dan memperkuat polarisasi sosial. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia, fenomena tersebut menjadi tantangan serius karena dapat mengganggu prinsip persatuan dan kehidupan sosial yang harmonis.

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas berbagai latar belakang etnis, agama, budaya, dan kelompok sosial. Keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang dapat memperkuat kehidupan demokratis, tetapi pada saat yang sama membutuhkan sistem nilai yang mampu mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan

bernegara, Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sistem etika yang memberikan orientasi moral bagi perilaku warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan komunikasi masyarakat di era digital.

Sebagai sistem etika, Pancasila menyediakan kerangka normatif mengenai bagaimana kebebasan individu harus dijalankan dalam hubungan sosial. Kebebasan berekspresi dalam demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang melekat dengan tanggung jawab untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Prinsip tersebut terutama tercermin dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam membangun interaksi sosial. Dalam konteks komunikasi digital, aktualisasi nilai tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku menghargai perbedaan pendapat, menghindari penghinaan berbasis identitas, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap aktivitas komunikasi di media sosial.

Meskipun demikian, implementasi nilai etika tersebut dalam kehidupan digital masih menghadapi berbagai hambatan. Media sosial sering menjadi ruang munculnya konflik komunikasi yang berkaitan dengan isu identitas, politik, agama, dan kelompok sosial tertentu. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi sering kali berkembang menjadi serangan verbal, pelabelan negatif, bahkan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hate speech tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan internalisasi nilai etika dalam perilaku masyarakat digital.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku komunikasi digital, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai penyebaran informasi bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun konten yang dapat menimbulkan permusuhan berdasarkan identitas tertentu. Namun, pendekatan hukum semata belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas fenomena ujaran kebencian. Hal tersebut disebabkan karena hate speech tidak hanya muncul akibat ketiadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran etika digital, kemampuan literasi informasi, serta pemahaman terhadap nilai keberagaman dalam masyarakat.

Kota Medan menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan karakter masyarakat yang heterogen dari sisi etnis, agama, budaya, dan kelompok sosial. Interaksi masyarakat Medan yang berlangsung dalam ruang sosial maupun ruang digital menunjukkan dinamika keberagaman yang kompleks. Media sosial komunitas digital di Kota Medan menjadi arena tempat berbagai pandangan, identitas, dan kepentingan sosial dipertukarkan. Dalam situasi tertentu, perbedaan tersebut dapat menjadi ruang dialog, tetapi juga memiliki potensi berkembang menjadi konflik komunikasi ketika tidak disertai dengan prinsip etika dalam berinteraksi.

Kajian mengenai Pancasila, etika sosial, dan komunikasi digital telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Wulansari dan Kiftiyah (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran dalam membangun sikap toleransi dan

menghadapi persoalan intoleransi sosial melalui penguatan kesadaran nilai kebangsaan. Sementara itu, Piter dan Riyanto (2024) menjelaskan bahwa aktualisasi nilai Pancasila perlu dipahami secara kontekstual agar tidak berhenti sebagai konsep filosofis, tetapi mampu diterapkan dalam menghadapi persoalan sosial kontemporer. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki relevansi sebagai pendekatan nilai dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk perubahan pola komunikasi akibat perkembangan teknologi digital.

Di sisi lain, penelitian mengenai hate speech di media sosial selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan hukum, komunikasi, atau literasi digital. Kajian yang menempatkan Pancasila secara khusus sebagai sistem etika dalam menganalisis perilaku komunikasi masyarakat digital masih relatif terbatas. Sebagian penelitian membahas pencegahan ujaran kebencian melalui regulasi dan pengawasan teknologi, sementara dimensi filosofis mengenai bagaimana nilai Pancasila diterjemahkan menjadi praktik etika digital belum banyak dikaji secara mendalam. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang menghubungkan nilai fundamental Pancasila dengan realitas komunikasi masyarakat dalam ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi Pancasila sebagai sistem etika dalam menanggulangi fenomena hate speech pada komunitas digital Kota Medan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat memahami, menerapkan, dan memaknai nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas komunikasi digital, serta bagaimana prinsip etika Pancasila dapat digunakan sebagai pendekatan dalam membangun budaya komunikasi yang bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif filosofis Pancasila dengan fenomena komunikasi digital kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan etika di era media sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis fenomena hate speech dalam ruang digital lokal serta memahami aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dalam menghadapi perilaku komunikasi masyarakat di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif jumlah ujaran kebencian, melainkan berupaya memahami bentuk, konteks, makna, dan implikasi sosial dari praktik komunikasi digital yang berkembang dalam komunitas siber Kota Medan.

Lokasi penelitian difokuskan pada ruang interaksi digital masyarakat Kota Medan melalui platform media sosial Instagram, khususnya pada akun publik @medantalk dan @medanviraltalk. Pemilihan kedua akun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki karakteristik sebagai ruang informasi digital yang banyak diakses masyarakat lokal serta menampilkan berbagai isu sosial yang berpotensi memunculkan perdebatan publik. Kolom komentar pada kedua akun tersebut dipandang sebagai representasi interaksi warga digital (digital citizenship) dalam merespons isu-isu sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat Kota Medan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital (digital observation) dan dokumentasi terhadap unggahan serta interaksi komentar pengguna Instagram.

Observasi dilakukan dengan mengidentifikasi unggahan yang memiliki tingkat interaksi tinggi dan memuat isu sensitif, seperti persoalan sosial, kriminalitas, identitas kelompok, agama, etnis, maupun konflik interpersonal. Data penelitian berupa teks komentar pengguna Instagram yang mengandung indikasi ujaran kebencian, seperti penghinaan (insult), pencemaran nama baik (defamation), provokasi (provocation), maupun bentuk komunikasi lain yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan konflik sosial.

Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria komentar yang dianalisis meliputi: (1) komentar yang secara eksplisit maupun implisit menyerang individu atau kelompok tertentu; (2) komentar yang mengandung unsur penghinaan berbasis identitas, penyebaran tuduhan tanpa dasar, atau ajakan melakukan tindakan kekerasan; dan (3) komentar yang memiliki relevansi dengan konteks kehidupan sosial masyarakat Kota Medan. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan bentuk hate speech untuk melihat pola komunikasi negatif yang muncul dalam ruang digital lokal.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Tahapan analisis meliputi proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan makna. Pada tahap reduksi data, komentar-komentar yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan kategori hate speech yang meliputi penghinaan, pencemaran, dan provokasi. Setelah proses klasifikasi, data dianalisis menggunakan perspektif etika Pancasila dengan melihat keterkaitannya terhadap nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Keabsahan data penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi komentar digital dengan berbagai sumber literatur akademik mengenai etika digital, Pancasila sebagai sistem etika, komunikasi sosial, dan fenomena hate speech. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Kota Medan sebagai komunitas multikultural sehingga analisis tidak hanya melihat aspek kebahasaan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk hate speech yang berkembang dalam komunitas digital Kota Medan serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan etis dalam membangun perilaku komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab.

Hasil dan Pembahasan

Klasifikasi Hate Speech dalam Ruang Siber Lokal Kota Medan

Berdasarkan hasil observasi digital dan dokumentasi terhadap interaksi pengguna pada akun Instagram @medantalk dan @medanviraltalk, ditemukan bahwa ruang komentar kedua platform tersebut menjadi arena interaksi publik yang memperlihatkan beragam bentuk ekspresi masyarakat digital. Interaksi yang muncul tidak hanya berupa penyampaian pendapat atau tanggapan terhadap informasi, tetapi

juga memperlihatkan penggunaan bahasa yang mengandung serangan personal, pelabelan negatif, serta ekspresi yang berpotensi memperkuat konflik antarpengguna. Pada akun **@medantalk**, yang memiliki karakter sebagai media informasi lokal masyarakat Kota Medan, pola komentar cenderung muncul sebagai respons terhadap isu sosial yang sedang menjadi perhatian publik. Beberapa komentar menunjukkan penggunaan bahasa emosional ketika pengguna merespons isu yang berkaitan dengan kriminalitas, perilaku sosial, maupun kelompok tertentu. Sementara itu, pada akun **@medanviraltalk**, karakter unggahan yang lebih berorientasi pada aspek viralitas menyebabkan munculnya pola interaksi yang relatif lebih konfrontatif. Kolom komentar sering menjadi ruang kompetisi opini, di mana pengguna memberikan respons secara spontan dengan penggunaan bahasa yang lebih agresif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik konten dan budaya interaksi pada masing-masing akun turut memengaruhi bentuk komunikasi yang berkembang. Unggahan yang memiliki unsur kontroversi atau konflik sosial cenderung menghasilkan respons dengan muatan emosional lebih tinggi dibandingkan unggahan informatif biasa. Berdasarkan hasil analisis, bentuk-bentuk *hate speech* yang ditemukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Fenomena Hate Speech dalam Kolom Komentar @medantalk dan @medanviraltalk

Kategori Hate Speech	Manifestasi Kontekstual dalam Komunitas Digital Kota Medan	Potensi Dampak Sosial
Insult (Penghinaan)	Penggunaan kata-kata merendahkan, makian, pelabelan negatif, serta istilah lokal yang digunakan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakter fisik, latar belakang sosial, maupun identitas kelompok.	Menurunkan kualitas komunikasi digital dan berpotensi memperkuat stereotip serta prasangka sosial.
Defamation (Pencemaran Nama Baik)	Penyampaian tuduhan sepihak terhadap individu tertentu tanpa dukungan informasi yang memadai, terutama pada isu kriminalitas atau figur publik lokal.	Berpotensi menyebabkan kerusakan reputasi dan pembentukan opini publik berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Provocation (Provokasi)	Komentar yang mendorong respons emosional berlebihan, termasuk ajakan melakukan tindakan langsung terhadap pihak tertentu tanpa melalui mekanisme hukum.	Dapat memperbesar konflik sosial dan mendorong tindakan kolektif yang tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian masalah secara damai.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengelola akun telah melakukan beberapa bentuk pengendalian terhadap interaksi pengguna. Pada akun **@medantalk**, misalnya, terdapat pembatasan fitur komentar yang memungkinkan pengelola melakukan kontrol terhadap pengguna yang dapat memberikan respons. Namun, mekanisme teknis tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan munculnya ujaran kebencian. Hal ini disebabkan karena pengguna sering menggunakan variasi bahasa, istilah lokal, singkatan, maupun bentuk sindiran yang sulit dikenali oleh sistem penyaringan otomatis (*automated filtering system*).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian teknologi memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan etika komunikasi digital. Pencegahan *hate speech* tidak hanya membutuhkan mekanisme moderasi berbasis teknologi, tetapi juga membutuhkan kesadaran pengguna mengenai tanggung jawab moral dalam berkomunikasi di ruang publik digital.

Pembahasan

Aktualisasi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Menghadapi Hate Speech Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena *hate speech* pada komunitas digital Kota Medan tidak hanya berkaitan dengan persoalan penggunaan bahasa, tetapi juga menggambarkan tantangan dalam penerapan nilai etika ketika masyarakat berinteraksi melalui media sosial. Ruang digital memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas moral karena komunikasi digital berlangsung dalam ruang sosial yang melibatkan hak dan martabat individu maupun kelompok lain.

Dalam perspektif Pancasila sebagai sistem etika, perilaku komunikasi masyarakat digital perlu dipahami berdasarkan prinsip bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki nilai dan martabat. Fenomena penghinaan dan pelabelan negatif yang ditemukan pada kolom komentar menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**. Ketika seseorang menggunakan media sosial untuk merendahkan atau menyerang identitas pihak lain, komunikasi tersebut tidak lagi sekadar ekspresi pendapat, tetapi telah memasuki wilayah yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap manusia sebagai subjek yang memiliki hak sosial.

Selain aspek kemanusiaan, fenomena *hate speech* juga berkaitan dengan nilai persatuan dalam Pancasila. Media sosial memiliki kemampuan mempertemukan individu dengan latar belakang berbeda, tetapi tanpa kesadaran etis, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik identitas. Komentar yang menggunakan stereotip terhadap kelompok tertentu dapat memperkuat batas sosial antara "kelompok kami" dan "kelompok mereka". Dalam konteks masyarakat Kota Medan yang memiliki keberagaman etnis dan budaya, pola komunikasi semacam ini berpotensi mengganggu hubungan sosial yang selama ini dibangun melalui interaksi antar kelompok.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam mengatasi *hate speech* bukan hanya terletak pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menginternalisasi nilai etika dalam aktivitas digital. Regulasi seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengendalian perilaku digital, tetapi pendekatan hukum memiliki keterbatasan karena tidak semua bentuk komunikasi negatif dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Banyak bentuk ujaran kebencian muncul melalui bahasa simbolik, sindiran, atau istilah lokal yang membutuhkan pemahaman sosial dan budaya dalam proses identifikasinya.

Dalam konteks tersebut, aktualisasi Pancasila dapat dipahami sebagai pendekatan preventif yang menempatkan kesadaran moral pengguna sebagai bagian utama dari budaya digital. Nilai kemanusiaan mendorong pengguna untuk mempertimbangkan dampak komunikasi terhadap orang lain, nilai persatuan

mengarahkan masyarakat untuk menjaga keberagaman, sedangkan nilai musyawarah mendorong penyelesaian perbedaan melalui dialog, bukan serangan verbal.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik algoritma media sosial dan penyebaran komunikasi bermuatan negatif. Sistem rekomendasi pada platform digital cenderung meningkatkan visibilitas konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi, termasuk komentar yang bersifat kontroversial. Akibatnya, komentar bernada konflik dapat memperoleh perhatian lebih besar dan menciptakan persepsi bahwa ekspresi tersebut mendapatkan penerimaan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan *hate speech* di era digital tidak hanya berasal dari individu pengguna, tetapi juga berkaitan dengan karakter lingkungan teknologi yang membentuk pola interaksi.

Dengan demikian, penanggulangan *hate speech* membutuhkan pendekatan yang bersifat multidimensional. Pendekatan teknologi diperlukan untuk memperkuat moderasi konten, pendekatan hukum diperlukan untuk memberikan batas normatif, sedangkan pendekatan etika melalui aktualisasi nilai Pancasila diperlukan untuk membangun kesadaran internal pengguna. Dalam konteks komunitas digital Kota Medan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai konsep ideologis, tetapi dapat menjadi kerangka moral yang membantu masyarakat mengembangkan budaya komunikasi digital yang menghargai keberagaman dan menjaga hubungan sosial.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *hate speech* dalam komunitas digital Kota Medan merupakan persoalan komunikasi yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam penerapan etika pada ruang publik digital. Berdasarkan analisis terhadap interaksi pada akun Instagram @medantalk dan @medanviraltalk, ditemukan beberapa bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kategori penghinaan (*insult*), pencemaran nama baik (*defamation*), dan provokasi (*provocation*). Kemunculan bentuk-bentuk tersebut dipengaruhi oleh karakteristik isu yang dibahas, dinamika interaksi pengguna, serta karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran respons secara cepat dan luas.

Aktualisasi Pancasila sebagai sistem etika memiliki relevansi dalam menghadapi fenomena tersebut karena nilai-nilai Pancasila memberikan dasar moral bagi perilaku komunikasi masyarakat digital. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat individu, sedangkan nilai persatuan dalam sila ketiga menjadi landasan untuk menjaga hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat. Dalam konteks ruang digital, Pancasila dapat dipahami bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai pedoman praktis dalam membangun kesadaran bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penanggulangan *hate speech* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan regulasi dan teknologi. Meskipun mekanisme moderasi digital dan aturan hukum memiliki peran penting dalam membatasi penyebaran konten bermuatan kebencian, keberhasilannya tetap bergantung pada kesadaran etis pengguna. Keterbatasan sistem algoritma dalam memahami bahasa lokal, simbol, dan konteks sosial menunjukkan bahwa persoalan ujaran kebencian membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan

menggabungkan aspek teknologi, hukum, literasi digital, dan penguatan nilai kebangsaan.

Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi kerangka etika dalam membangun budaya komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Kota Medan. Aktualisasi nilai Pancasila dalam ruang digital bukan hanya diperlukan untuk mengurangi perilaku hate speech, tetapi juga untuk membentuk pola interaksi masyarakat yang mampu menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik melalui dialog, dan mempertahankan kohesi sosial di tengah perkembangan teknologi komunikasi.

Refrensi

- [1] Aggraini, I. P., Aptafaizza, M. S., & Alifah, Z. M. N. (2026). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika bermedia sosial di era digital. *Indonesian Journal of Education, Learning, and Evaluation*. <https://doi.org/10.63199/idjele.v1i2.108>
- [2] Fadhilah, E. A., & Dewi, D. A. (2022). Penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1121–1127.
- [3] Fausan, M. D., Khalisya, A., Saputra, N. R., Rizki, A., Saputra, M. L. F., & Jemalu, G. G. (2026). Peran Bahasa Indonesia sebagai sarana penanaman nilai Pancasila dalam pencegahan intoleransi dan radikalisme di media sosial. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*. <https://doi.org/10.53800/5874hm59>
- [4] Indrayani, K., Sulaksono, S., Tamsil, T., & Prasetio, D. E. (2024). From citizen ideology to netizen ideology: The legal culture of digitizing Pancasila in realizing politeness on social media. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i1.845>
- [5] Kartini, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 405–418.
- [6] Kesuma, S., Susilawati, E., Tanjung, J. P., Fadhilah, C., Admiral, R. D., Mardiansyah, M., Lubis, H., Nasution, I. R., Purnomo, T., & Harahap, E. S. (2025). Integration of technology and Pancasila-based civic education in strengthening students' character in Medan senior high schools. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/2576-8484.v9i11.11050>
- [7] Lestari, E. Y., Janah, M., & Wardanai, P. K. (2019). Menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globalisasi melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- [8] Maulana, A. R., Simbolon, E., Pasaribu, E., Sipayung, K., Winera, N. M. P., Wanimbo, S., Toruan, S. R. L., Purba, Y. F. B., & Ivanna, J. (2025). Persepsi mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Stambuk 23 UNIMED terhadap implementasi sila kemanusiaan dan persatuan dalam menghadapi ujaran kebencian di media sosial Instagram. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4669>
- [9] Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Anam, I. K., Natasya, H. A., Salsabila, R., Pandawa, Jl., Dusun, P., Kartasura, Kec., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2025).

- Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i1.5063>
- [10] Mujahidin, M., & Jannah, N. Z. (2025). Memahami Pancasila dalam algoritma media sosial: Analisis wacana digital tentang ideologi bangsa. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1602>
- [11] Naibaho, D. M. (2025). Pancasila sebagai filter sosial di era digital. *Journal of Social, Justice and Policy*. <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i4.59>
- [12] Nawawi, M., Lee, E., Firdaus, R., & Muafi. (2025). The meaning of Pancasila in civil society movements for strengthening democracy. *Jurnal Pelita Raya*. <https://doi.org/10.65586/jpr.v1i3.31>
- [13] Putradipradja, M. S. F., Jatmika, W. A., & Situmeang, S. (2026). Revitalizing Pancasila values in the digital era in preventing moral decadence of the younger generation. *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2405>
- [14] Ramdlanah, S., & Fikriyati, U. (2022). Perspektif Al-Qur'an tentang ujaran kebencian di media sosial: Studi analisis terhadap penafsiran ayat-ayat etika sosial. *Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir*. <https://doi.org/10.59005/jsqt.v1i1.230>
- [15] Samosir, H. A., & Akbar, M. (2023). Internalizing Pancasila values on Generation Z cadets of Medan Aviation Polytechnic in social media. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i1.8370>
- [16] Setiawan, R. (2026). Establishing an ethical digital public sphere based on the principles of Pancasila. *Smart: Journal of Global Islamic Studies and Social Science*. <https://doi.org/10.65101/sgisci.v1i2.44>
- [17] Setyawan, V. (2023). Pancasila as a philosophical basis of law formation in Indonesia. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(1), 1–8.
- [18] Setyowati, F. I., Amaliah, N., & Irawan, A. D. (2026). Tinjauan etika warga digital dalam perspektif nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v13i1.533>
- [19] Sikana, A. M., Dzulqarnain, A. A., Syafitri, F. R., & Faizin, M. (2025). Peran Pancasila sebagai fondasi identitas nasional Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 78–84.
- [20] Siregar, C., Pane, M. M., & Anwar, R. (2019). Pancasila, ethos respect, and anti-hoaxes on internet-based social media. In *Proceedings of the 7th International Conference on Computer and Communications Management*. <https://doi.org/10.1145/3348445.3348446>
- [21] Situmeang, M., Syakirina, A., Sidabutar, P., Gultom, T., & Pulungan, K. (2025). The implementation of Pancasila values in cyberbullying cases among students. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.302>
- [22] Subakdi, S. (2026). Penerapan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa di era digital sebagai generasi penerus bangsa. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v6i3.12534>
- [23] Telaumbanua, D. N., Nababan, E. J., Fatiha, Y. A., & Ivanna, J. (2026). Analisis etika bermedia sosial mahasiswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila di Fakultas

Ilmu Pendidikan UNIMED. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*.
<https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.12558>

[24] Wau, J. J. G. (2025). Pancasila sebagai filter sosial di tengah era digital. *Journal of Social, Justice and Policy*. <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i5.65>

[25] Yorman, Y., & Sadam, S. (2025). Pancasila as an ethics of social media to realize digital citizens. *Journal of Social Studies Education*.
<https://doi.org/10.71094/josse.v1i1.89>